

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kota Pariaman. Hal ini dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya peraturan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Untuk melaksanakan tujuan dari peraturan tersebut, Kota Pariaman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman membuat Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kota Pariaman yang mana memiliki dua kegiatan yaitu: kegiatan peningkatan pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Kegiatan Sosialisasi Penerapan Teknologi Pedesaan.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Kota Pariaman belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan belum tercapainya tujuan dari program yang disebabkan oleh belum adanya komitmen penuh dari pemerintah dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna. Pelaksanaan program masih hanya sebatas untuk mengumpulkan alat-alat teknologi yang nantinya diikuti dalam lomba dan gelar teknologi tepat guna baik tingkat sumbar maupun nasional. Belum

adanya anggaran untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna serta kurangnya respon masyarakat terhadap program, sehingga tujuan kebijakan belum tercapai.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah peneliti lakukan berupa wawancara peneliti dengan informan serta dokumentasi yang peneliti dapatkan terkait pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kota Pariaman yang pembahasannya dikaitkan dengan Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa standar dan sasaran belum jelas dan terukur. Hal ini dikarenakan perbedaan antara kebijakan dengan pemahaman implementor sehingga berimplikasi pada pembuatan program yang belum menyentuh tujuan dari kebijakan itu sendiri, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut belum tercapai.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan ketersediaan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia dalam pelaksanaan program ini belum mencukupi. Hal ini dikarenakan masih kurangnya jumlah pegawai yang ada pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman yang menjadi pelaksana program. Ketersediaan dana, sarana dan prasarana juga belum mencukupi untuk melaksanakan program.

3. Hubungan Antar Organisasi

Pada variabel hubungan antar organisasi pada indikator komunikasi sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik. Komunikasi yang terjalin, baik secara horizontal maupun vertikal berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Pada indikator koordinasi belum berjalan dengan baik karena belum adanya terjalin koordinasi antara dinas dan kecamatan terkait pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada variabel karakteristik agen pelaksana tidak ditemui kendala yang berarti. Indikator norma-norma yang berlaku yang diterapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman bersifat umum seperti pegawai PNS lainnya. Struktur organisasi sudah cukup baik karena memiliki rentang kendali yang tidak begitu luas dan ramping. Pola hubungan yang terjadi sudah berjalan dengan baik karena tidak ada kendala yang begitu berarti.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dalam variabel kondisi sosial, ekonomi dan politik masih ditemukannya banyak kendala antara lain: pada lingkungan sosial yaitu sikap dari kelompok sasaran yang masih belum sadar dengan manfaat teknologi, serta masih enggan untuk beralih menggunakan teknologi. Masyarakat lebih nyaman menggunakan cara tradisional sehingga agak sulit untuk mengimplementasikan program pada kelompok sasaran. Pada indikator kondisi politik masih kurangnya dukungan dari pemerintah Kota Pariaman dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan

teknologi Industri dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna, hal ini masih kurangnya anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk pelaksanaan program.

6. Disposisi Implementor

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa implementor sudah memahami tugas dan fungsinya dalam melaksanakan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Implementor mempunyai komitmen untuk melaksanakan apa yang telah menjadi wewenangnya yang terdapat dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka ada beberapa saran yang harapannya nanti dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Kota Pariaman, saran-saran itu antara lain:

1. Perlu adanya aturan daerah khusus atau petunjuk teknis pelaksanaan yang mengatur pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Kota Pariaman, sehingga ada panduan yang jelas bagi implementor dalam melaksanakan program.

2. Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Finansial pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman, atau dapat menggunakan sumber dana lain yang dapat dimanfaatkan dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Kota Pariaman.
3. Perlu ditingkatkannya penguatan Kelembagaan Posyantek di kecamatan agar penyampaian informasi dan sosialisasi mengenai Alat Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat lebih maksimal.
4. Perlu dilaksanakannya Gelar TTG Tingkat Kota oleh pemerintah Kota Pariaman sebagai penyediaan pasar alat TTG yang telah diciptakan oleh inovator, atau Pemerintah Kota Pariaman memberikan akses inovator kepada investor agar alat yang diciptakan dapat memberikan manfaat juga kepada inovator.
5. Perlu adanya kerja sama dengan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan instansi lainnya dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna.

